

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, dkk., 1995, *Sistim Transportasi Kota*, Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- Azmi Fendri, 2016, “*Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*”, PT Raja grafindo, Jakarta
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 1999, “*Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*”, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas BPKP, Jakarta
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta
- C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, 2003, “*Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1*”, Erlangga, Jakarta
- Departemen Perhubungan, 1998 “*Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*”, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta
- Dunn dan William N, 2003, “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Hanif nurcholis, 2005, “*Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*”, Grasindo, Jakarta
- Indroharto, 1994, “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*”, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irfan Fachruddin, 2004, “*Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*”, PT Alumni, Bandung
- Kaelan, 2014, “*Pendidikan Pancasila Edisi Revisi Kesepuluh*”, Paradigma, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2001, “*Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*”, Bina Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Rajawali pers, Jakarta

Ridwan HR, 2018, "*Hukum Administrasi Negara*", Rajawali pers, Depok

Soedharyo, 1995, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 1995, "*Hukum Perjanjian*", Intermasa, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6642

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 8.

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 4.

## **Jurnal**

Achmad Subhan Syahputra, Perizinan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang kaki lima, *Skripsi*, Universitas Jember, 2018.

Ahmadi Imran, Implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum gajah mada oleh dinas perhubungan kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 4, No 2, 2016.

Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa. *Jurnal Hukum Positum*, Vol 1, No. 1, 2016

Erwin Harahap dkk, Efektivitas Load Balancing Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas, *Jurnal Matematika*, Vol 16. No 2, 2017.

Mifta farid dkk, Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah, *Jurnal Lentara Hukum*, Vol 4, No 2, 2017.

Moh Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi, Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol 2 No 3, 2020.

Rinda Hesti Kusumaningtyas, Evaluasi dan perancangan sistem lahan parkir. *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 9, No 1, 2016.

## **Internet**

<http://www.galeripustaka.com>, “Pengertian, Jenis dan Lebar Bahu Jalan” diakses pada tanggal 2 september 2022

<http://wahyudianto-eko.blogspot./2011/01/teori-kebijakan.html> diakses pada tanggal 3 september 2022

<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-perlindungan-hukum-bagi-aparatur-negara-dalam-hukum-positif-di-indonesia-2019-11-05-53c4e4ad/> diakses pada tanggal 5 september 2022

<https://paralegal.id/pengertian/jalan/> diakses pada tanggal 17 agustus 2022

<https://www.blogteknik.my.id/2020/10/pengertian-jalan-dan-bagian-bagian-jalan.html> diakses pada tanggal 17 agustus 2022

<https://detik.com> “Preventif adalah : Art, Upaya, dan Contoh Tindakannya”, Oleh Debora Danisa Diakses pada tanggal 20 Januari 2023